

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020 melalui beberapa peraturan. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Belum meratanya pelaksanaan kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi yang berada di LLDIKTI Wilayah IV didorong oleh peran Humas dalam mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan MBKM. Pada tahun 2023 terdapat 225 perguruan tinggi yang telah melaksanakan MBKM di lingkungan Wilayah IV dari total 438 Perguruan Tinggi. Maka dibutuhkan peran humas yang lebih aktif dan efektif agar perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam kegiatan MBKM.

Hadirnya Kebijakan dan Kegiatan Mandiri Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan suatu sarana upaya pemerataan kualitas mutu Perguruan Tinggi yang digagas oleh Kemendikbudristek. Kebijakan Kampus Merdeka bertujuan untuk memberikan ruang dan kebebasan yang lebih besar bagi Civitas perguruan tinggi dalam mengembangkan diri dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat (Nizam, dkk., 2023).

Khususnya pada Episode ke-26 Merdeka Belajar bertajuk “Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi” dan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengarah untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sehingga dapat sejajar dengan perguruan tinggi dunia .

Merdeka Belajar Episode Ke-26 memudahkan perguruan tinggi untuk lebih fokus dalam meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Daripada terfokus kepada beban administrasi dan finansial perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2023).

Menindaklanjuti pentingnya kebijakan pelaksanaan peningkatan mutu, maka kebijakan tersebut harus segera disebarluaskan kepada pengelola perguruan tinggi agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam penyampaian kebijakan tersebut diperlukan peran Humas, dalam hal ini Humas LLDIKTI Wilayah IV yang merepresentasikan Kemendikbudristek di tingkat daerah. Fungsi Humas LLDIKTI Wilayah IV sebagai salah satu bagian dari unit kerja maupun unit pelaksana teknis eselon II di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publikasi informasi dan pelayanan pengaduan pelayanan publik untuk mensosialisasikan kebijakan MBKM.

Agar penyampaian kebijakan berjalan dengan efektif dibutuhkan Strategi komunikasi agar berjalan dengan baik dan sesuai rencana, karena tanpa sebuah strategi komunikasi, seringkali berbagai kegiatan tidak dapat berlangsung dengan baik atau rencana dan tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi sebagaimana

mestinya. Hal ini didukung oleh pendapat Effendy (2017:32) bahwa Strategi Komunikasi merupakan paduan perencanaan (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi (Wulandari:2018).

Strategi Komunikasi adalah suatu sistem perencanaan dan manajemen untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Pentingnya strategi komunikasi menjadi faktor yang jadi penunjang dalam keberhasilan yang ingin disampaikan atau sesuatu mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Kebijakan maupun program-program yang dimiliki oleh pemerintahan harus terealisasi dengan baik sehingga bisa sampai dan diketahui oleh masyarakat (Ruslan: 2000).

Menurut Middleton dalam Cangara (2013:61) Strategi Komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Humas LLDIKTI Wilayah IV menginisiasi Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi dan Badan Penyelenggara Tahun 2024. Rakor ini bukan hanya sekadar forum tahunan untuk membahas isu-isu penting dalam pendidikan tinggi, tetapi juga merupakan strategi kunci dalam mensosialisasikan dan menggerakkan implementasi MBKM di lingkungan

LLDIKTI Wilayah IV. Melalui rakor ini, Humas LLDIKTI Wilayah IV berupaya untuk menyampaikan informasi terkini, mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan MBKM, serta mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi dan badan penyelenggara untuk berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut.

Rakor Perguruan Tinggi dan Badan Penyelenggara Tahun 2024 menjadi salah satu strategi efektif Humas LLDIKTI Wilayah IV dalam memastikan bahwa program MBKM dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara luas di seluruh perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Pelaksanaan kebijakan dan kegiatan MBKM di LLDIKTI Wilayah IV mendapatkan apresiasi dari pemerintah melalui Anugerah Humas Diktiristek Tahun 2023 meraih Gold Medal kategori Kampus Merdeka Mandiri. Anugerah tersebut menyoroti instansi yang melakukan kegiatan implementasi Program Kampus Merdeka Mandiri.

Program MBKM Mandiri yang digagas oleh LLDIKTI Wilayah IV berfokus pada pendidikan diluar kampus, memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Mahasiswa secara langsung bersama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah di desa dengan harapan mampu mengembangkan potensi desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus selama 3 Semester maksimum 60 SKS.

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara karena menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif, pendidikan tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul (Kemendikbudristek, 2023).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertugas menyusun kebijakan dan melaksanakan program-program pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pada tingkat perguruan tinggi pendidikan diselenggarakan melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kementrian/Lembaga Lain (PTK) dan Perguruan Tinggi Agama (PTA). Seluruh jenis perguruan tinggi ini berkontribusi besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4.522 terdiri dari 2.982 (PTS), 1.244 (PTA), 125 (PTN), dan 171 (PTK) (Kemendikbudristek, 2022).

Berkembangnya perguruan tinggi swasta di berbagai daerah adalah cara pihak swasta dalam membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan tinggi untuk masyarakat. Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan*

sosial...” (UUD 1945). Dalam rangka mewujudkan amanat UUD-1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pihak swasta hadir dalam menyediakan akses penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi bagi masyarakat mengisi celah kekosongan di Perguruan Tinggi Negeri .

Seiring dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan perguruan tinggi di berbagai daerah yang harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tugas dan wewenang kepada LLDIKTI untuk melakukan fungsi tersebut.

LLDIKTI Wilayah IV bertugas menaungi perguruan tinggi terbanyak di Indonesia, terdiri dari 13 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 438 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terdiri dari 116 Universitas, 24 institut, 171 sekolah tinggi, 75 akademi, 48 politeknik, 4 akademi komunitas (Direktori LLDIKTI4, Mei 2024) yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten. Jumlah ini menjadikan LLDIKTI Wilayah IV sebagai salah satu LLDIKTI dengan naungan perguruan tinggi swasta terbanyak dibandingkan dengan LLDIKTI lainnya. Sehingga menjadi barometer ukuran kualitas perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Fungsi LLDIKTI salah satunya pelaksanaan pemerataan mutu pendidikan tinggi dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi serta pelaksanaan fasilitasi

kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal (Permendikbudistek No 35, 2021)

Mutu Perguruan Tinggi saat ini salah satunya diukur melalui Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Kategori akreditasi terbagi kedalam 3 Tipe yaitu : Akreditasi A (Unggul), B (Baik Sekali), C (Baik) (Permendikbud No 3, 2022).

Di LLDIKTI Wilayah IV terdapat 9 Perguruan Tinggi yang mendapatkan akreditasi Unggul(A), 102 Perguruan Tinggi terakreditasi Baik Sekali(B), 206 Perguruan Tinggi terakreditasi Baik(C) sedangkan yang tidak terakreditasi berjumlah 124 Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan tinggi. Karena hanya ada 9 Perguruan Tinggi yg mendapatkan Akreditasi Unggul dari BAN-PT (Direktori LLDIKTI4, Mei 2024).

Mengingat pentingnya peran Humas di LLDIKTI Wilayah IV sebagai penyambung informasi dan yang menindaklanjuti keberhasilan program MBKM, serta lembaga yang memfasilitasi peningkatan mutu maka perlu untuk dikaji lebih mendalam, sehingga akan mendapatkan sebuah nilai bagi perguruan tinggi. Khususnya sebagai rujukan Ilmu Komunikasi dalam konteks Strategi Komunikasi yang mampu menyebarluaskan peran Humas dalam proses sosialisasi MBKM. Bagi peneliti hal ini sangat menarik untuk diteliti, selain belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, juga merupakan kajian implementasi Strategi Komunikasi serta Komunikasi Organisasi yang terus berkembang dan dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian sebagai berikut:” **STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS MELALUI SOSIALISASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI DI LLDIKTI WILAYAH IV JAWA BARAT DAN BANTEN**”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Humas Melalui Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten?

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana Humas LLDIKTI Wilayah IV melakukan **Research (Penelitian)** Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten?
2. Bagaimana **Action (Tindakan)** Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten?
3. Bagaimana **Communication (Komunikasi)** Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten?
4. Bagaimana **Evaluation (Evaluasi)** Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui secara lebih jelas tentang bagaimana Strategi Komunikasi Humas Melalui Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **Research (Penelitian)** yang dilakukan oleh Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten.
2. Untuk mengetahui **Action (Tindakan)** yang dilakukan oleh Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten.
3. Untuk mengetahui **Communication (Komunikasi)** Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada dalam Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten.
4. Untuk Mengetahui **Evaluation (Evaluasi)** Humas LLDIKTI Wilayah IV Pada Sosialisasi MBKM Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Terwujudnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi pada bidang Ilmu Komunikasi, khususnya tentang pemahaman konteks Komunikasi Organisasi terkait Strategi Humas yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah IV dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis di antaranya:

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait Strategi Komunikasi Humas serta sebagai salah satu rujukan untuk meneliti lebih lanjut dari sisi dan masalah penelitian yang sama.

2. Kegunaan Bagi LLDIKTI Wilayah IV

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, masukan, kepada Humas LLDIKTI Wilayah IV, dalam mensosialisasikan kebijakan Kemendikbudristek di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi HUMAS LLDIKTI Wilayah IV, dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi di wilayah kerja yaitu Jawa Barat dan Banten